



**DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN**

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



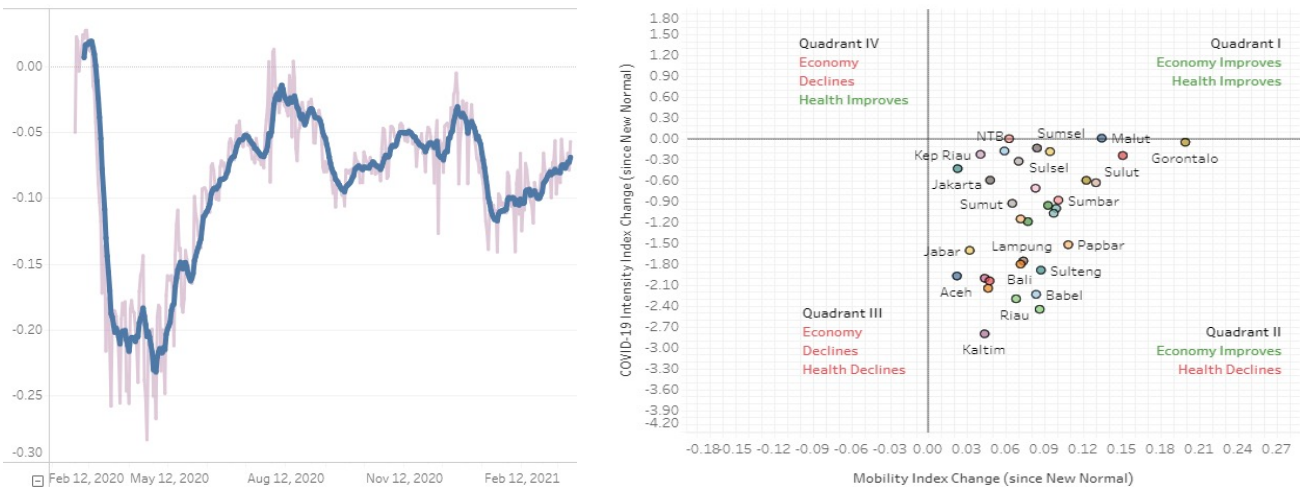
LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH

Periode 15 s.d. 26 Maret 2021

Astera Primanto Bhakti • Harry Z. Soeratin •
Putut Hari Satyaka • Adriyanto • Bhimantara
Widyajala • Agung Widiadi
Subandono • Amrul Yusroni • Yadi Hadian •
Jackwin Simbolon • Mulyono • Kurnia • Radies
Kusprihanto Purbo • Miftah Chalamsa •
Adrian Kusuma Pratama • Purwandi Santoso •
Arifudin Miftakhul Huda • Mario Agustino •
Eko Arisyanto • Britany Alasen Sembiring •
Desy Puspita Anggraeni • Nabillah Rahma •
Nadia Nurul Nisa • Narits Muhammad
Syafuruddin • Selma Syifa Khoirunnisa

KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH

Aktivitas Perekonomian Berdasarkan Mobility Index

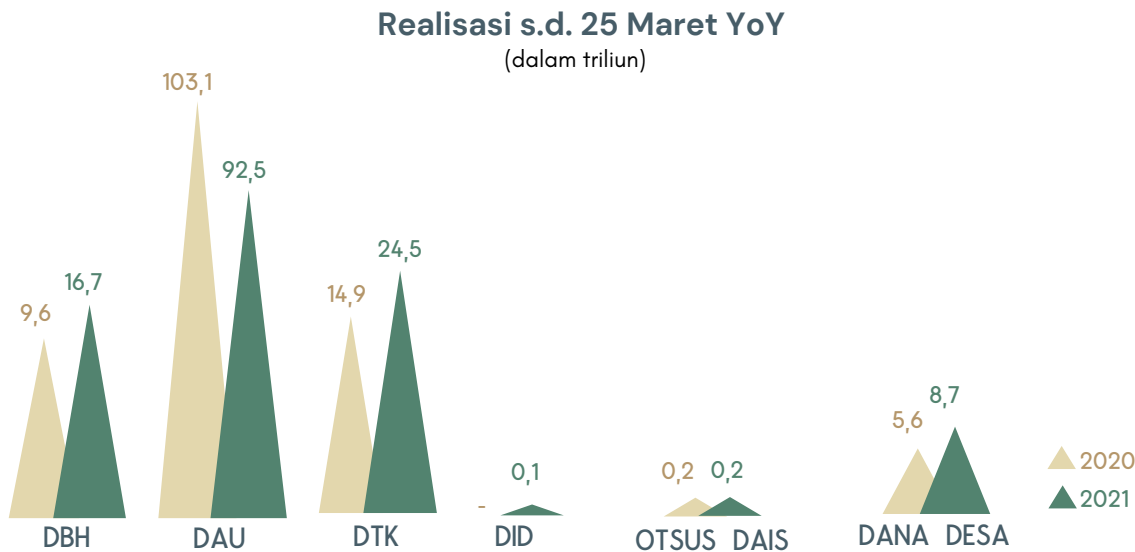


- Aktivitas perekonomian, berdasarkan *mobility index**, mengalami kenaikan dalam jangka waktu 12 Maret sampai dengan 22 Maret 2021, yaitu dari -0,084 menjadi -0,057.
- Berdasarkan analisis kuadran dengan menggunakan variabel *mobility index* dan *COVID-19 intensity index change* per 22 Maret 2021, **tidak ada provinsi** yang masuk ke dalam **kuadran III** (keadaan kesehatan dan ekonomi memburuk). Provinsi yang posisinya menjadi **frontier bawah** adalah **Kalimantan Timur** dan **Aceh**. Sedangkan provinsi yang berada di **kuadran I** (kondisi kesehatan dan ekonomi membaik) adalah **NTB**, **Maluku Utara**, dan **Gorontalo**.

► *Data CSIS

KINERJA TKDD DAERAH

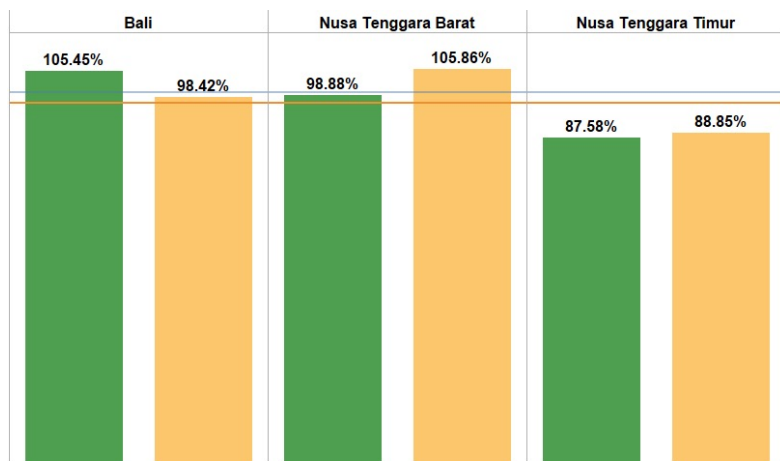
Realisasi TKDD 2021 s.d. 25 Maret 2021



- Secara YoY, realisasi s.d. **25 Maret 2021** sebesar Rp142,72 T mengalami **kenaikan 7,0%** dibandingkan realisasi s.d. 25 Maret 2020 sebesar Rp133,40 T.
- DAU** mengalami **penurunan** sebesar **10,2%** akibat terdapat daerah yang belum memenuhi persyaratan DAU berbasis kinerja. Sedangkan **DBH** mengalami **kenaikan** sebesar **73,8%**, **DTK** **naik 64,2%**, dan **Dana Desa** **naik 54,4%**.
- Realisasi BLT sebesar Rp750,639 M kepada 804.215 KPM.

KINERJA FISKAL DAERAH

Kinerja APBD Pulau Bali dan Nusa Tenggara



Hanya **Provinsi Bali** yang mempunyai **realisasi pendapatan agregat** TA 2020 yang **lebih tinggi dari angka Nasional** sebesar **99,77%** dari Anggaran Penyesuaian. Namun untuk **realisasi belanja** agregat, hanya **NTB** yang realisasinya **di atas angka Nasional** sebesar **96,99%**.

41. PAD	2019	18.75 T
	2020	13.37 T
42. TKDD	2019	51.21 T
	2020	45.06 T
43. Pendapatan Lainnya	2019	5.50 T
	2020	5.52 T
51. Belanja Pegawai	2019	25.25 T
	2020	25.02 T
52. Belanja Barang Jasa	2019	17.99 T
	2020	15.19 T
53. Belanja Modal	2019	12.42 T
	2020	8.49 T
54. Belanja Lainnya	2019	19.41 T
	2020	16.30 T

■ 2019
■ 2020

1. Pelayanan Umum	25.20 T
	22.41 T
3. Ketertiban dan Keamanan	0.88 T
	0.81 T
4. Ekonomi	4.55 T
	3.30 T
5. Lingkungan Hidup	1.08 T
	0.93 T
6. Perumahan dan Fasilitas Umum	7.79 T
	5.36 T
7. Kesehatan	12.03 T
	11.68 T
8. Pariwisata dan Budaya	0.96 T
	0.65 T
10. Pendidikan	21.67 T
	19.10 T
11. Perlindungan Sosial	0.91 T
	0.77 T

*Realisasi 2020 masih sangat sementara per 7 Maret 2021

- Secara YoY, pemda di Bali & Nusra mengalami **penurunan Pendapatan** sebesar **15,25%** yang **lebih tinggi dari angka Nasional** sebesar 11,82%. Sedangkan **penurunan Belanja** di Bali & Nusra sebesar **13,41%** yang juga **lebih tinggi dari angka Nasional** sebesar 11,92%.
- Salah satu sumber **penurunan** pendapatan adalah penurunan **PAD**, yaitu sebesar **28,70%**. **Penurunan pajak daerah** disebabkan, terutama pajak yang **berbasis konsumsi**, seperti penurunan **Pajak Hiburan 68,88%**, **Pajak Hotel 72,60%**, **Pajak Restoran 58,54%**, **BBNKB 47,69%**, dan **PBBKB 23,18%**.
- Hampir **seluruh komponen belanja** mengalami **penurunan**, kecuali **Belanja Tak Terduga** yang **naik 4361,64%**, sejalan dengan kebijakan realokasi dan *refocusing* dalam rangka penanganan pandemi di 2020.

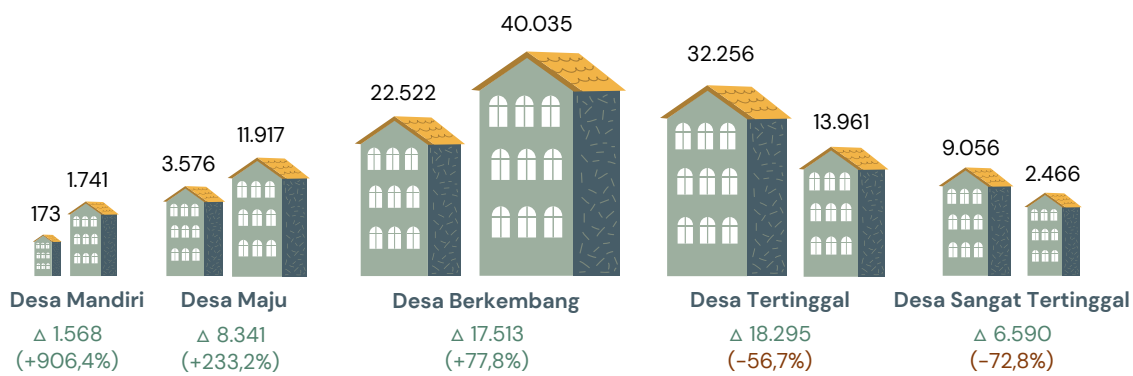
- Belanja seluruh fungsi** mengalami **penurunan** realisasi secara YoY.
- Belanja yang mengalami **penurunan terbesar** adalah **Pariwisata dan Budaya** sebesar **32,80%** dan **Perumahan dan Fasum** sebesar **31,28%**. Untuk fungsi **Kesehatan** masih relatif terjaga dan hanya turun sebesar **2,86%** dalam rangka penanganan pandemi di 2020.

KINERJA PEMBANGUNAN DESA

Pelaksanaan Dana Desa mendorong semakin menurunnya desa tertinggal dan sangat tertinggal. Pada tahun 2015, jumlah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal mencapai 32.256 desa dan 9.056 desa. Pada tahun 2020, jumlah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal turun drastis dimana desa tertinggal menurun 56,7% (18.295 desa) dan desa sangat tertinggal berkurang 72,8% (6.590 desa). Di sisi lain, jumlah desa maju dan desa mandiri semakin meningkat. Jumlah desa maju pada tahun 2015 sebanyak 3.576 desa dan desa mandiri hanya 173 desa. Pada tahun 2020 jumlah desa mandiri telah mencapai 1.740 desa atau meningkat 906% (1.568 desa), sedangkan desa maju bertambah 233% (8.341 desa) menjadi 40.035 desa. Peningkatan status desa tersebut menunjukkan adanya tren yang semakin baik dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Jumlah Desa menurut IDM 2015–2020

(Sumber: Kemendes PDTT)



5 Provinsi dengan IDM Tertinggi

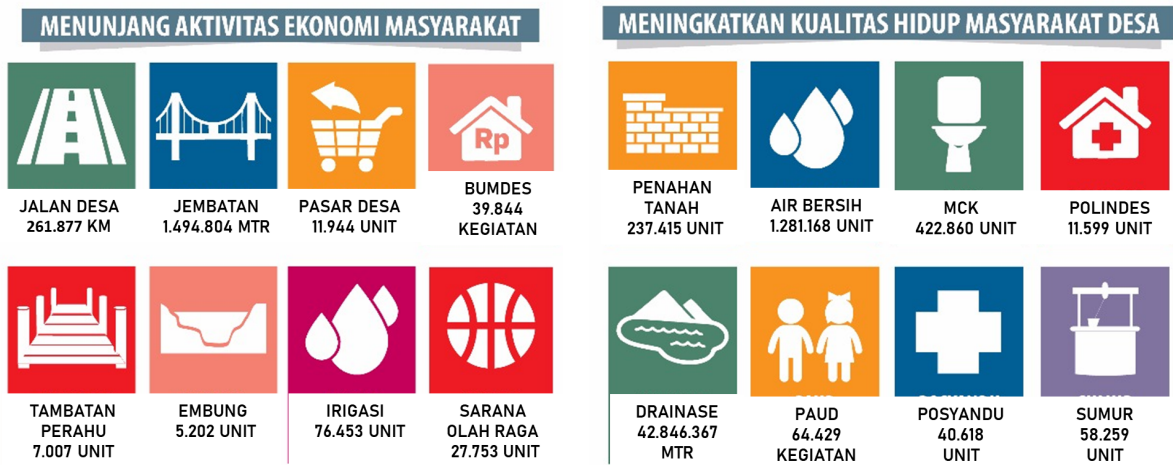
RANKING	PROVINSI	STATUS IDM			
1	BALI	2021 2020	MANDIRI dari 345 Desa MAJU dari 636 Desa	0.8220 0.7879	+4.15%
2	DI YOGYAKARTA	2021 2020	MAJU dari 94 Desa MAJU dari 392 Desa	0.7597 0.7684	-1.15%
3	SULAWESI SELATAN	2021 2020	MAJU dari 9 Desa BERKEMBANG dari 2.255 Desa	0.7469 0.6466	+13.43%
4	RIAU	2021 2020	MAJU dari 31 Desa BERKEMBANG dari 1.591 Desa	0.7450 0.6589	+11.56%
5	JAWA TIMUR	2021 2020	MAJU dari 1121 Desa BERKEMBANG dari 7.725 Desa	0.7323 0.7025	+4.07%

5 Provinsi dengan IDM Terendah

RANKING	PROVINSI	STATUS IDM			
21	ACEH	2021 2020	BERKEMBANG dari 366 Desa BERKEMBANG dari 6.496 Desa	0.6433 0.6129	+4.73%
22	SULAWESI TENGGARA	2021 2020	BERKEMBANG dari 10 Desa BERKEMBANG dari 1.908 Desa	0.6338 0.6079	+4.09%
23	KALIMANTAN TIMUR	2021 2020	BERKEMBANG dari 2 Desa BERKEMBANG dari 841 Desa	0.6245 0.6750	-8.09%
24	NUSA TENGGARA TIMUR	2021 2020	TERTINGGAL dari 5 Desa TERTINGGAL dari 3.026 Desa	0.5787 0.5805	-0.31%
25	SUMATERA UTARA	2021 2020	TERTINGGAL dari 73 Desa TERTINGGAL dari 5417 Desa	0.5651 0.5958	-5.43%

KINERJA PEMBANGUNAN DESA

Peningkatan status desa didukung oleh besarnya belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dikeluarkan oleh pemerintah desa melalui masing-masing APBDes. Secara akumulatif, belanja pembangunan desa dalam APBDes tahun 2019 mencapai 63,75 triliun sedangkan belanja pemberdayaan masyarakat mencapai Rp9,15 triliun.



Di tingkat pemerintah daerah, meskipun Pemerintah Daerah mempunyai kapasitas fiskal yang terbatas di tahun 2020, pemerintah daerah tetap mengalokasikan belanjanya untuk pembangunan dan pemberdayaan desa, di luar pendanaan mandatory ke desa seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

TOP 10 APBD 2020

NO	DAERAH	APBD 2020
1	KAB. TORAJA UTARA	30.062.000.000
2	PROV. DI YOGYAKARTA	12.000.000.000
3	KAB. TANA TORAJA	10.674.420.700
4	KAB. KETAPANG	10.237.767.654
5	KOTA TERNATE	10.172.956.533
6	KAB. BOYOLALI	8.585.000.000
7	PROV. JAWA BARAT	7.575.092.990
8	KAB. BENGKULU TENGAH	5.603.500.000
9	KAB. PELALAWAN	5.325.621.920
10	KAB. TABALONG	5.314.600.00

BOTTOM 10 APBD 2020

NO	DAERAH	APBD 2020
1	KAB. TANAH BUMBU	1.850.000
2	KAB. LANDAK	4.380.000
3	KAB. NIAS SELATAN	5.222.593
4	KAB. GOWA	5.375.250
5	KAB. PENAJAM PASER UTARA	5.750.000
6	KAB. MANGGARAI	7.528.200
7	KAB. MINAHASA TENGGARA	10.216.000
8	KAB. PIDIE JAYA	14.000.000
9	KAB. TANA TIDUNG	14.960.000
10	KAB. BINTAN	15.000.000

Kabupaten Toraja Utara mengalokasikan APBD 2020 untuk Belanja Pembangunan dan Pemberdayaan Desa tertinggi, sementara Kabupaten Tana Bumbu paling kecil. Hal ini juga dipengaruhi oleh jumlah desa yang berbeda di setiap daerah juga program yang direalisasikan. Pulau Jawa yang memiliki belanja paling besar direpresentasikan oleh Provinsi Di Yogyakarta, Kabupaten Boyolali, dan Jawa Barat yang memiliki cukup banyak desa.

INOVASI DAERAH

Inovasi Badan Usaha Milik Desa Amin Jaya, Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

Desa Amin Jaya yang lokasinya berada di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah adalah desa yang tadinya merupakan area tujuan transmigrasi. Area ini mulai dibuka tahun 1982, yang kemudian terus berkembang menjadi desa mandiri. Sebagian besar wilayah Desa Amin Jaya berupa kebun sawit. Oleh karena itu, industri sawit sangat dominan di Desa Amin Jaya selain perkebunan karet. Di Desa Amin Jaya terdapat tiga perusahaan swasta pengolah sawit dan sebagian besar warga Desa Amin Jaya bekerja sebagai karyawan di tiga perusahaan tersebut selain bekerja sebagai petani, wiraswasta, dan buruh tani.



► Sumber: <https://aminjaya.desa.id>

Problem warga desa, utamanya para petani adalah para tengkulak yang menentukan harga, karena menguasai jalur pemasaran. Untuk melindungi para petani, pada 1 Maret 2014, Pemerintah Desa Amin Jaya mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Jaya Abadi (KJA). BUMDes tersebut bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha, disamping meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Dalam perjalanannya, BUMDes Karya Jaya Abadi atas kerja keras, inovasi dan kreatifitasnya, berhasil memperoleh penghargaan sebagai BUMDes paling kreatif tingkat nasional karena dinilai aktif, inovatif, serta memiliki langkah yang cukup berani dalam berbagai bidang usaha dan memajukan perekonomian masyarakat desa.

► Inovasi usaha yang dilaksanakan oleh BUMDes KJA, antara lain:

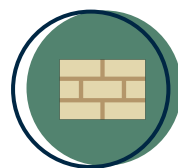


Jual-Beli Buah Sawit atau Unit Penukaran Replas TBS (Tandan Buah Segar).

Untuk melindungi petani dari jeratan para tengkulak, BUMDes melakukan kontrak usaha dengan perusahaan pengolah sawit yang ada di sekitar desa, sehingga petani bisa menjual hasilnya langsung ke pabrik. Bukti pengiriman sawit, yang biasa disebut replas, ditukarkan dengan uang tunai di BUMDes. Perusahaan sawit, pada gilirannya nanti, akan mengirim pembayaran ke BUMDes melalui transfer bank. Cara ini memudahkan transaksi, karena perusahaan sawit cukup berhubungan dengan satu pihak saja, yakni BUMDes, yang bertindak sebagai perantara bagi para petani.

Usaha Produksi *Paving Block*.

Dibentuknya unit usaha ini didasari pertimbangan bahwa kebutuhan perbaikan infrastruktur di desa terus meningkat, tak hanya di Desa Amin Jaya namun juga di desa-desa lain. Produk paving jalan ini mampu menahan beban sampai 12 ton dan banyak diserap pasar, sekurang-kurangnya untuk memenuhi kebutuhan di Desa Amin Jaya sendiri. Usaha pembuatan *paving block* ini juga bersifat padat karya, sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja setempat.



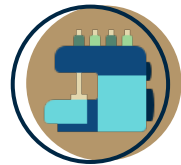


Perawatan Jalan Kebun.

Pabrik pengolah sawit dan kebun budidaya sawit merupakan satu mata rantai yang harus terhubung dengan baik melalui transportasi yang lancar. Persoalannya, truk-truk pengangkut sawit membawa beban yang berat, sehingga menyebabkan kerusakan jalan-jalan penghubung di dalam area kebun, terutama di musim hujan. Atas inisiatif bersama antara pemerintah desa dan petani pemilik kebun, para petani menyerahkan pengelolaan jalan di lahannya kepada BUMDes. Dengan adanya unit usaha pengelolaan jalan kebun ini, petani diuntungkan karena transportasi hasil budidaya petani menjadi lebih lancar.

Usaha Konveksi.

BUMDes KJA juga mengembangkan usaha di bidang konveksi dengan memproduksi baju dinas, baju batik, kaus olah raga, jasa sablon, dll. BUMDes juga menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga, organisasi, komunitas, dan perusahaan setempat.



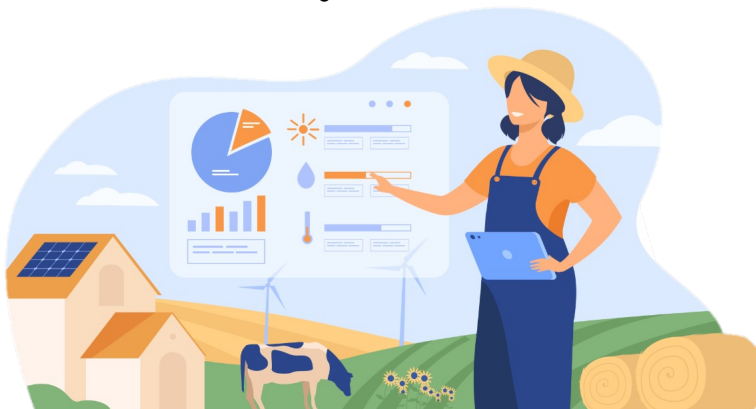
Unit BRILink.

Melihat kurangnya fasilitas anjungan tunai dan bank di desa, serta banyaknya transaksi keuangan setiap harinya, BUMDes Karya Jaya Abadi bekerjasama dengan Bank BRI untuk membuka Unit Brilink. Unit brilink BUMDes Karya Jaya Abadi melayani berbagai layanan transaksi perbankan diantaranya pengambilan uang tunai, cek saldo tabungan, transfer uang, pembayaran tagihan, dll



Unit-unit usaha BUMDes KJA, terutama jual-beli TBS, mampu menghasilkan omzet 500 juta setiap bulannya, sehingga memperoleh dukungan penuh dari pemerintah desa. Dukungan dari pemerintah desa untuk BUMDes yang sudah dilakukan antara lain berupa monitoring, evaluasi dan memberikan penyertaan modal desa masing-masing sebesar Rp 200 juta di tahun 2018, 2019 dan Rp 50 juta di tahun 2020 yang bersumber dari Dana Desa. Dari Hasil usahanya tersebut BUMDes KJA mampu berkontribusi cukup besar kepada PADes Desa Amin Jaya sebesar Rp175 juta di tahun 2020, dan masing-masing sebesar Rp150 juta di tahun 2019 dan 2018.

Keberhasilan Desa Amin Jaya dalam mengelola unit-unit usaha BUMDes menjadi kebanggaan tersendiri dan menjadi motivasi pengelola BUMDes dan Pemerintah Desa untuk terus berinovasi, serta menarik berbagai desa lain untuk melakukan studi banding dan belajar mengelola BUMDes. Disamping itu, bumdes juga dapat menjadi sarana dalam membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberhasilan BUMDes KJA juga tidak terlepas dari peran serta dan dukungan dari Pemkab Kotawaringin Barat yang melakukan pembinaan serta mendorong BUMDes Karya Jaya Abadi menjadi lebih semakin sukses dan berkembang.

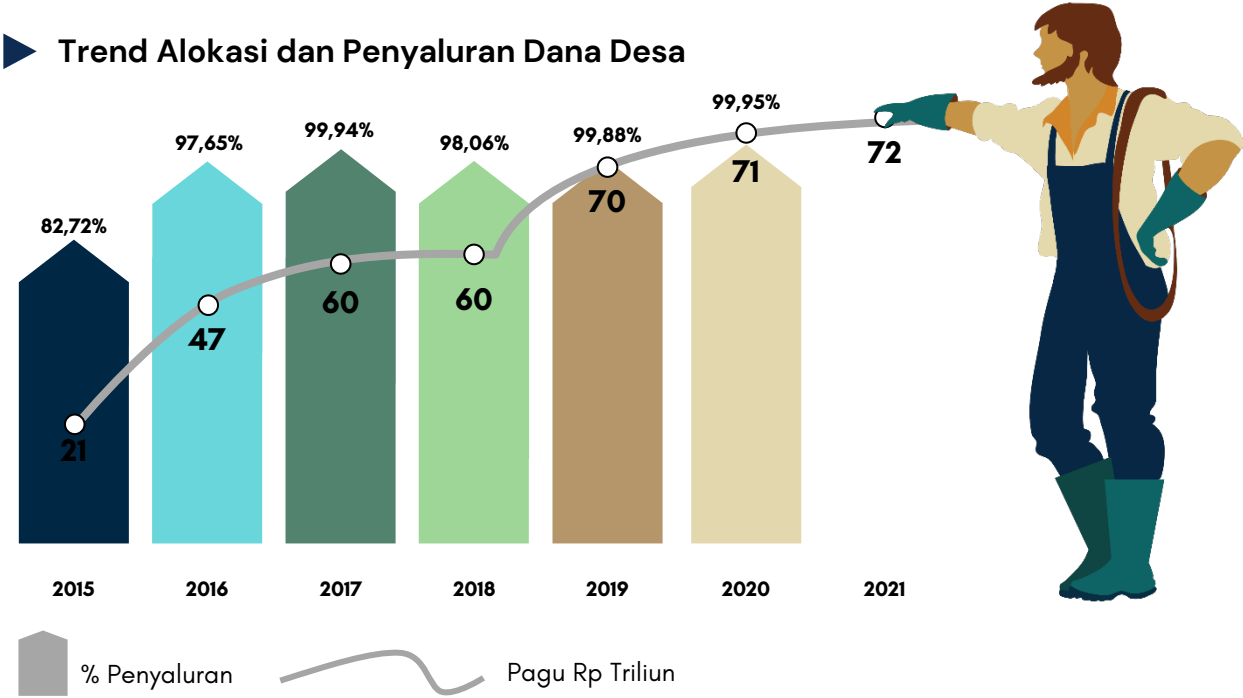


Optimalisasi Pembangunan Desa sebagai Embrio Pembangunan Nasional

“ Menurut saya,
membangun Desa
artinya **membangun Indonesia**.
- Joko Widodo

Keberadaan Desa secara formil diatur dalam amandemen kedua UUD 1945 dengan memunculkan Pasal 18B, yang selanjutnya menjadi dasar pembentukan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sejak saat itu, perhatian terhadap Desa menjadi sangat krusial.

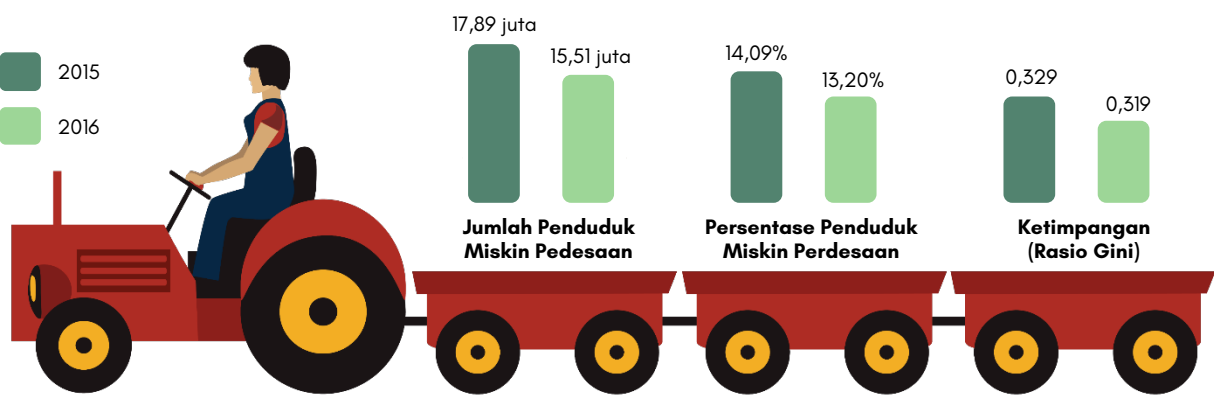
Perhatian tersebut ditandai dengan adanya alokasi Dana Desa yang besarnya meningkat tajam dari hanya Rp 21 triliun di tahun 2015 menjadi Rp 72 triliun di tahun 2021 atau naik sebesar 342%. Dengan jumlah desa yang relatif sama dalam kurun lima tahun tersebut (sekitar 74.093 desa tahun 2015 menjadi 74.961 desa di tahun 2020), maka nilai Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa pun dari yang hanya sekitar Rp280 juta/desa menjadi Rp960,5 juta/desa. Tingkat penyerapan Dana Desa pun semakin baik, dari yang hanya 82,72% di tahun 2015 menjadi 99,95% atau hampir 100% di tahun 2020.



Secara umum, dapat dikatakan bahwa Desa memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada dana transfer, baik transfer dari Pemerintah Pusat (berupa Dana Desa), maupun dari Pemerintah Daerah (berupa dana bagi hasil pajak dan retribusi, Alokasi Dana Desa, dan lain-lain). Menurut Statistik Keuangan Desa tahun 2020 yang diterbitkan oleh BPS, Pendapatan Asli Desa hanya berkontribusi sebesar sekitar 2,5% - 3% dari total Pendapatan Desa. Dari sisi Belanja, sebesar 33% dari total Belanja Desa adalah untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (belanja administratif), sekitar 44% untuk Pembangunan Desa, dan 12% untuk Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat.

Besarnya Dana Desa yang telah ...

Besarnya Dana Desa yang telah dikucurkan sangat bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, hal ini terbukti dari berbagai outcome yang telah dihasilkan. Berdasarkan data September 2015 dan 2020, jumlah penduduk miskin di desa berkurang dari 17,89 juta jiwa pada tahun 2015 menjadi sebanyak 15,51 juta jiwa pada tahun 2020. Persentase penduduk miskin di desa juga turun dari sebesar 14,09 persen pada tahun 2015 menjadi sebesar 13,20 persen pada tahun 2020. Ketimpangan di perdesaan juga menurun dengan membaiknya Rasio Gini dari 0,329 pada tahun 2015 menjadi 0,319 pada tahun 2020.

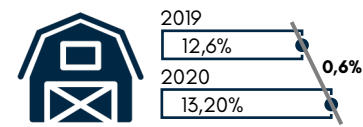


Tentunya capaian-capaian positif tersebut tidak terlepas dari kebijakan dan strategi Pemerintah dalam memperbaiki tata kelola Dana Desa.

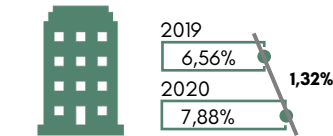
Beberapa kebijakan telah diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki tata kelola Dana Desa. Selain dari aspek alokasi, strategi yang diambil pemerintah untuk mengawal Dana Desa agar efektif dalam mengatasi kemiskinan adalah dari sisi penggunaan seperti program yang mampu menyerap tenaga kerja di desa dan menjaga sustainabilitas perekonomian desa. Dengan demikian, beberapa arah kebijakan diarahkan kearah pengembangan kapasitas desa seperti optimalisasi peranan BUMDes sebagai motor perekonomian daerah.

Menghadapi Pandemi Covid-19, peran Desa dalam menahan laju peningkatan kemiskinan juga sangat besar. Menurut Berita Resmi Statistik 2020, pandemi COVID-19 telah menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan di Indonesia dari 9,22% pada September 2019 menjadi 10,19% pada September 2020. Namun bila dilihat lebih dalam, maka **kenaikan tingkat kemiskinan di pedesaan (hanya naik 0,6% dari 12,6% menjadi 13,20%) jauh lebih kecil daripada di perkotaan (naik 1,32% dari 6,56% menjadi 7,88%)**. Demikian halnya dengan kenaikan tingkat pengangguran terbuka yang hanya 4,71% di pedesaan, dibandingkan dengan 8,98% di perkotaan. Hal ini selaras dengan indikator ekonomi yang dirilis BPS pada tahun lalu, dimana pada triwulan kedua, disaat sektor lain mulai berkontraksi dalam, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih tumbuh positif 16,24% (q to q) dan tumbuh 2,19% (YoY), dan tren positif tersebut terus bertahan hingga triwulan IV 2020.

Tingkat Kemiskinan di Pedesaan



Tingkat Kemiskinan di Perkotaan



Oleh karena itu, menjaga daya beli masyarakat desa dan meningkatkan kinerja dan potensi desa perlu terus mendapatkan perhatian. Untuk itu, Dana Desa kembali berperan sebagai alat *survival kit* di desa melalui refocusing penggunaannya dalam bentuk BLT Desa. Selain itu program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) juga terus didorong pelaksanaannya.

Namun demikian, hal tersebut bukanlah ...

Namun demikian, hal tersebut bukanlah sebuah tugas yang mudah. Selain pandemi COVID-19, tantangan lain untuk membangun Desa tentu masih ada. **Sebanyak 2.466 desa masih berstatus sangat tertinggal dan 13.961 desa tertinggal.** Belum lagi masih adanya sekitar 13.500 desa yang belum memiliki akses internet, dan bahkan 433 desa masih belum teraliri listrik (FEB UI, 2020). Pemerataan pembangunan Desa kemudian menjadi tantangan yang berat karena desa tertinggal tersebut terkonsentrasi di wilayah Indonesia Timur yang memang memiliki keterbatasan SDM dan kesulitan geografis. Selain itu akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa juga menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian ke depan, seperti perlunya peningkatan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan kebutuhan masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desanya.

Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu terus didorong untuk mendorong pembangunan ekonomi di desa antara lain, melalui kebijakan stimulus produksi pertanian. Hal ini penting mengingat satu-satunya sektor yang masih tumbuh di masa pandemi adalah sektor pertanian yang dibutuhkan untuk konsumsi tidak hanya masyarakat di desa namun juga di perkotaan. Selain itu, penguatan peran BUMDes perlu kembali menjadi fokus pasca pandemi berakhir. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang dapat mendorong agar BUMDes mampu untuk masuk ke dalam supply chain kebutuhan nasional dan peningkatan skill kewirausahaan masyarakat desa agar mampu mengembangkan produk unggulan daerah. Untuk itu, kapasitas SDM perlu terus ditingkatkan dengan terus melaksanakan pelatihan kader pemberdayaan desa.

“Poverty is not an accident, like slavery and apartheid, it is a man-made and can be removed by the actions of human beings.

– Nelson Mandela



Pemprov Lampung terus memacu suksesi Program Smart Village melalui pemberdayaan dan kolaborasi. Pada 2021, Pemprov Lampung menargetkan 130 desa dan ditambah dengan 650 desa lain yang berinisiatif secara mandiri mengikuti tata kelola program tersebut. Dalam dinamika perjalanan program ini dapat diidentifikasi ada empat kategori fokus implementasi yakni Desa Digital, Desa Pertanian Terintegrasi, Desa Wisata, dan Desa Ekonomi Kreatif. Pendekatan implementasi dengan tiga pilar utama yakni Smart Government, Smart Economy dan Inkubasi dengan skema kolaborasi penta helix. Selain itu, program smart village dilakukan melalui peningkatan literasi internet dan layanan perpustakaan bagi warga desa, fasilitasi digitalisasi administrasi desa, dan e-participation untuk mendorong keterlibatan masyarakat.

<https://www.lampost.co/>



Pemkab Balangan bekerjasama dengan Kejari Kabupaten Balangan melakukan pembekalan pengetahuan hukum kepada aparat Desa setempat. Pihak Kejari Balangan, memberikan informasi dan sosialisasi mengenai pengetahuan hukum untuk menekan potensi penyalahgunaan dana desa yang bersumber dari APBD maupun APBN. Pembekalan ilmu tentang hukum tersebut untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam pemanfaatan dana desa kedepannya. Sasaran kegiatan yakni para aparat desa dan BPD sebagai lembaga pengawas desa. Penyuluhan hukum bagi aparat desa bakal menjadi agenda rutin yang dilaksanakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan aparat desa dalam memahami ketentuan dan prosedur aturan.

<https://banjarmasin.tribunnews.com/>



Pemkab Penajam Paser Utara memberikan penghargaan kepada setiap desa di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berstatus mandiri dengan tambahan bantuan keuangan (bankeu) masing-masing sebesar Rp100 juta. Penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan status desa dari berkembang menjadi maju, kemudian menjadi mandiri. Bankeu senilai Rp100 juta bukan hanya sekedar wacana dan sudah diberikan kepada tiga desa yang ada di kabupaten tersebut yang sudah berstatus mandiri, diantaranya Desa Babulu Darat, Giri Mukti, dan Sukaraja.

<https://www.cendananews.com/>



Pemkab Merangin menggalas program “Desa Pinter” guna mewujudkan 62 desa *blank spot* sinyal handphone di Kabupaten Merangin menjadi desa menuju *smart city*. Desa Pinter adalah singkatan dari Desa Punya Internet, yaitu sebuah program pelayanan internet untuk pedesaan atau desa terisolir sekalipun. Program ini merupakan anak program dari proyek induk Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO) yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Jaringan internet menjadi salah satu kebutuhan masyarakat, terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak pada terbatasnya ruang gerak masyarakat. Namun, jaringan internet menjadi suatu barang langka dan mahal bagi masyarakat yang tinggal di area tanpa jaringan internet (*blank spot*), seperti di daerah pelosok pedesaan. Guna mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Merangin berupaya mengurangi daerah *blank spot* dengan menawarkan program Internet Desa Mandiri.

<https://jamberita.com/>



Dana desa dalam situasi pandemi saat ini dapat dimanfaatkan untuk dua hal, yaitu sebagai bantuan sosial bagi warga terdampak serta sebagai program padat karya sebagai program padat karya tunai di desa (PKTD). **Pemerintah Desa Sugihwaras, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur** melakukan gotong royong pembersihan eceng gondok di perairan waduk desa setempat, Selasa (22/3/2021). Gotong royong dilaksanakan melalui PKTD bersama 50 warga Desa Sugihwaras dengan anggaran Rp25 juta. Tak hanya membersihkan, gotong royong juga akan memasang pembatas untuk mencegah pergerakan eceng gondok dan sampah agar tidak mendekati waduk penampungan air minum. Pemdes Sugihwaras menjelaskan PKTD dari dana desa bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin, penganggur dan setengah penganggur, dan masyarakat marjinal lainnya.

<https://kanalindonesia.com/>



Pandemi Covid-19 ini sangat berdampak pada masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Hal ini membuat angka kemiskinan melonjak. Kondisi ini membuat **Kepala Desa Dungus Wiru, Limbangan, Garut, Jawa Barat**, berinisiatif membuat terobosan melalui program “ATM Beras”. Program ini bertujuan sebagai antisipasi bagi 443 KPM dari 1.400 KPM yang tidak menerima bantuan dari pemerintah. Sehingga, masyarakat merasa nyaman meskipun belum menerima bantuan dari pemerintah. Pemerintah desa juga sudah mengembangkan UMKM guna modal usaha yang dibagi menjadi 11 kelompok dan digerakkan oleh generasi muda untuk mengantisipasi tingkat pengangguran yang meningkat.

<https://www.merdeka.com/>

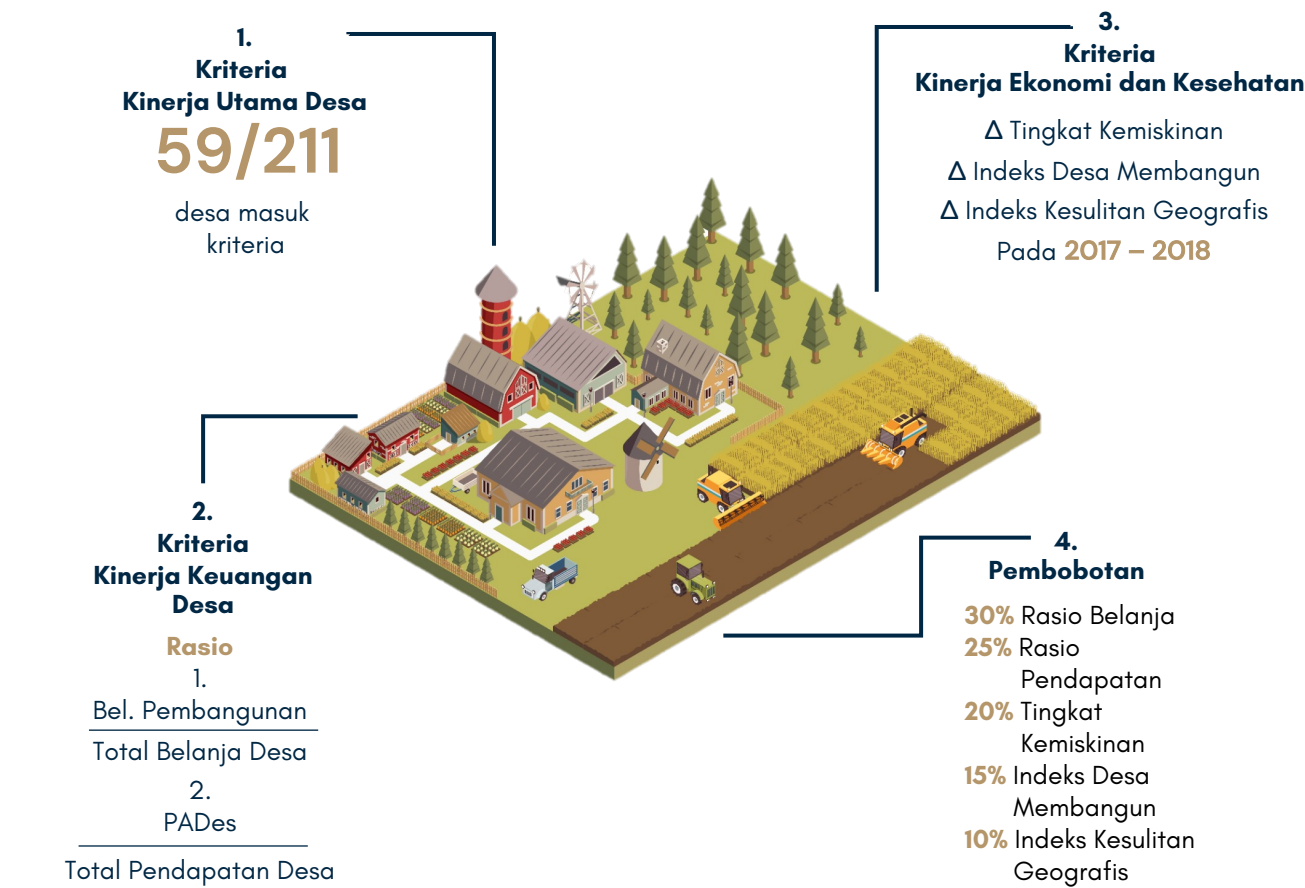


Dana Insentif Desa sebagai Pendorong Peningkatan Kinerja Desa (Studi pada Kabupaten Pemalang Tahun 2018)

Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemberian *reward* atau *incentive* bagi desa dalam rangka mendorong dan mempercepat terciptanya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Perhitungan insentif untuk desa (selanjutnya disebut Dana Insentif Desa) didesain dengan mengaplikasikan sebagian perhitungan yang digunakan pada Dana Insentif Daerah (DID). Terdapat tiga kriteria dalam perhitungan DID yaitu Kinerja Utama, Kinerja Keuangan, serta Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan. Dengan mengetahui konsep dasar penghitungan dan pengalokasian DID, penelitian ini mengkaji potensi penerapan formula penghitungan alokasi DID dalam penghitungan Dana Insentif Desa. Kabupaten Pemalang dipilih sebagai objek penelitian, karena meraih penghargaan dari *The World Summit on The Information Society (WSIS) Prizes* 2018 di Genewa. Pusat Pemberdayaan Informatika Pedesaan Kabupaten Pemalang termasuk satu dari 12 inisiatif karya dari Indonesia yang berhasil merebut penghargaan tersebut. Namun Kabupaten Pemalang berada pada peringkat ke-30 dari 34 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah dalam kategori jumlah penduduk miskin, sedangkan kategori IPM berada pada peringkat ke-6. Populasi penelitian ini adalah seluruh desa-desa di Kabupaten Pemalang, yaitu sebanyak 112 Desa.

Hasil Temuan Kajian

Dana Insentif Desa ditujukan untuk memotivasi desa dalam meningkatkan kinerja keuangan, kinerja ekonomi, maupun kinerja kesejahteraan. Akumulasi kinerja di tingkat desa (kinerja keuangan, kinerja ekonomi, dan kinerja kesejahteraan), diharapkan akan berdampak positif terhadap kinerja pada tingkat kabupaten, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kinerja di tingkat kabupaten secara keseluruhan. Adapun penentuan Dana Insentif Desa mengikuti skema sebagai berikut:



KAJIAN DAERAH

Berdasarkan skema tersebut, dipilih desa-desa yang memenuhi kriteria Kinerja Utama yang bersifat eligibilitas mutlak yaitu desa yang menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa secara tepat waktu. Desa-desa yang tidak termasuk dalam kriteria Kinerja Utama tidak masuk dalam tahapan perhitungan selanjutnya. Dari hasil pemilihan diperoleh desa-desa yang memenuhi kriteria Kinerja Utama yaitu terdapat 59 desa-desa yang tersebar di 14 kecamatan. Setelah dilakukan perhitungan terhadap 5 variabel diperoleh daftar nama 10 desa-desa yang tertinggi. Bagi 10 desa yang menjadi peringkat teratas akan memperoleh Dana Insentif Desa sebesar masing-masing Rp50 juta. Dana Insentif Desa yang dibutuhkan Kabupaten Pemalang sebesar Rp1,48 miliar.

► Saran dan Implikasi

Kajian ini memiliki beberapa saran dan implikasi, baik dalam praktik maupun bagi penelitian selanjutnya, yaitu:



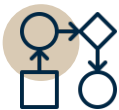
Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep insentif dapat diaplikasikan pada desa dalam bentuk Dana Insentif Desa.



Pemerintah daerah dapat menggunakan indikator yang berbeda dalam menilai alokasi Dana Insentif Desa sesuai dengan tujuan pengalokasian dan karakteristik desa.



Indikator penilaian perlu difokuskan selaras dengan tujuan dan prioritas daerah, misalnya bila daerah memiliki prioritas untuk mengurangi pengangguran di desa, maka indikatornya lebih ditujukan pada indikator ketenagakerjaan.



Pemda dapat melakukan penilaian dengan memperhatikan pada tahapan pengelolaan APBDesa, misalnya tahapan input, proses, output, outcome.



Perhitungan Dana Insentif Desa dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu kinerja absolut (capaian) dan perbaikan (selisih antara t_0 dengan $t-1$).



Pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan metode perhitungan guna memperoleh pemeringkatan desa yang lebih komprehensif dan berkesinambungan.



Pengembangan metode perhitungan dapat dilakukan dengan mengedepankan partisipasi desa dan masyarakat, sehingga komitmen perbaikan dapat terjalin.

Penulis: Ferie Sulistiono, Mahartha Titi, dan Cherry Husada Sirait